



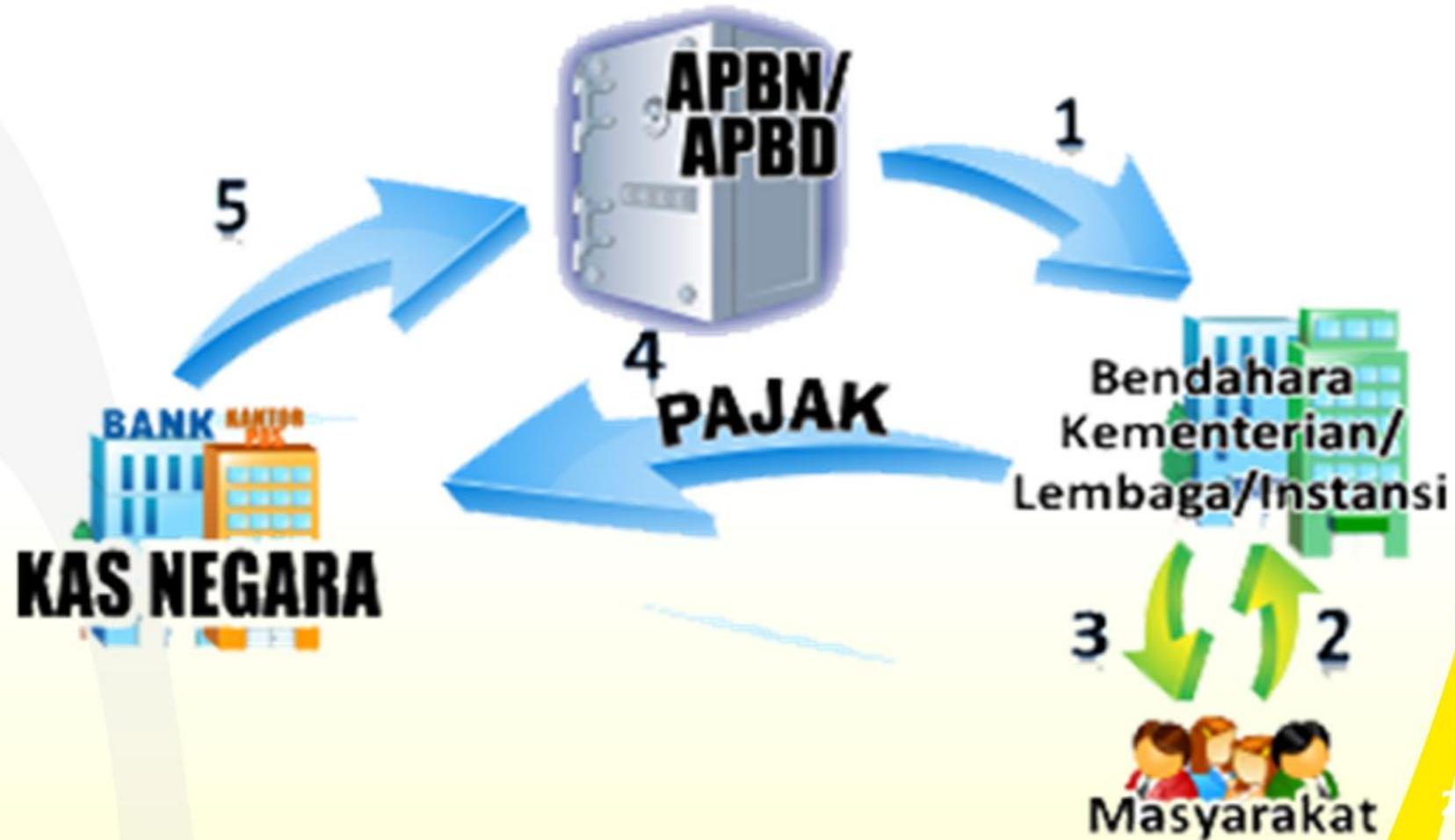
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak  
Tahun 2017

# Aspek Perpajakan Penggunaan Dana APBN/APBD

## Bagi Bendahara



## SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD



# KEWAJIBAN PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK

APBN

Setiap PA/KPA dan/atau **Bendahara** yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai **wajib pungut pajak** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

APBD

Bendahara pengeluaran sebagai **wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya**, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya **ke rekening Kas Negara** pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

*Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*



## Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai **PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK**

**UU**



- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP)
- UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)
- UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN)

**PP**



- PP Nomor 74 Th 2011 (Hak dan Kewajiban Perpajakan)
- PP Nomor 132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)
- PP Nomor 51 Th.2008 jo PP 40/2009 (Jasa Konstruksi)
- PP Nomor 34 Th.2016 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)
- PP Nomor 15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)
- PP Nomor 1 tahun 2012 (Pelaksanaan UU PPN)
- PP Nomor 146 Th 2000 jo PP 69/2015 (PPN dibebaskan)
- PP Nomor 81 Th 2015 (PPN Brg Strategis)



## **Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK**

**PER  
MENKEU**

- PMK No. 243/2014 (Bentuk dan Isi SPT)
- PMK No. 242/2014 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)
- PMK No.186/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
- PMK No.187/2015 (Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang)
- PMK No.252/2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)
- PMK No.246/2008 jo. No. 154/2009  
**(Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh)**
- PMK No.250/2008 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiu)
- PMK No.141/2015  
**(Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23)**
- PMK No. 34/PMK.010/2017  
**(Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan  
Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan  
Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain)**

# Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK

PERDIRJEN  
PAJAK

- PER-38/2009 jo. PER-24/2013  
(Bentuk Formulir SSP)
- PER No. 16/2016  
(Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 21 dan/atau PPh Pasal 26)
- PER No.14/2013  
(Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21)
- PER No.30/2009  
(Tata Cara Pengecualian Pembayaran PPh Pengalihan Hak Tanah & Bangunan)
- PER 24/2012 s.t.d.d. PER-17/PJ/2014  
(Faktur Pajak)
- PER No.14/2010 jo. No. 25/2014  
(Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN)



# **KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN**

**Mendaftarkan diri untuk  
mendapatkan NPWP**

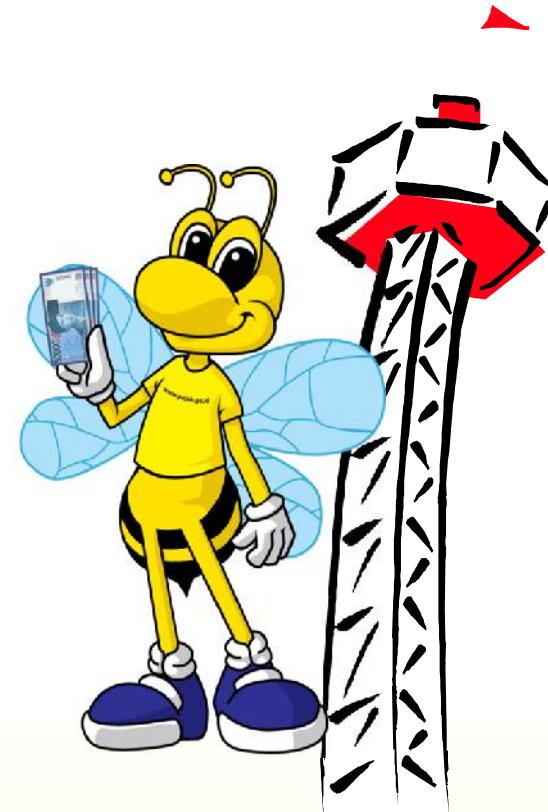
**Menyetor pajak terutang setelah  
terlebih dahulu menghitung &  
memotong/ memungut;**

**Melaporkan pajak terutang  
ke KPP atau KP2KP dengan  
menggunakan SPT.**





Kas negara



UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI  
BANK-BANK ATAU KANTOR POS





LAPOR



SPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP



# JENIS PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

|                |  |
|----------------|--|
| PPh Pasal 21   | Pemotongan atas penghasilan yg <b>dibayarkan kepada orang pribadi</b> sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan   |
| PPh Pasal 22   | Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan <b>pembelian barang</b>  |
| PPh Pasal 23   | Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, <b>sewa</b> , royalti, dan <b>jasa-jasa lainnya</b> selain Objek PPh Pasal 21   |
| PPh Pasal 4(2) | Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu ( <b>jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan</b> , pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya) |

# JENIS PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

PPN

Pemungutan atas **pajak konsumsi** yang dibayar sendiri sehubungan **penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

Bea Meterai

Pembayaran atas pemanfaatan **dokumen-dokumen tertentu** (kuitansi, kontrak)



**Bendahara Pemerintah**  
***ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat***

- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- Instansi atau Lembaga Pemerintah
- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri

**WAJIB NPWP**

**DI:**  
**KPP/KPP PRATAMA/  
KP2KP LOKASI**

**MENGISI FORMULIR  
PENDAFTARAN**

**SESUAI DENGAN  
SK PENUNJUKKAN BENDAHARA**

Apabila SK Penunjukkan tersebut disebutkan sebagai Bendahara pengganti Bendahara sebelumnya yang telah terdaftar, maka tidak perlu mendaftar baru dan hanya cukup *update* data di KPP tempat terdaftar.



PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN  
**PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**  
OLEH BENDAHARA



# PAJAK PENGHASILAN

# PASAL

# 21

## OBJEK

Penghasilan **tetap dan teratur** setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan

Penghasilan **tidak tetap dan tidak teratur** yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya

## DEFINISI

- ❑ Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
- ❑ Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
- ❑ Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
- ❑ Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

# PTKP TAHUN 2016 BERDASARKAN PMK 101/PMK.010/2016



Rp54.000.000,-  
DIRI Wajib Pajak



Rp4.500.000,-  
Tambahan untuk  
Wajib Pajak KAWIN



Rp4.500.000,-  
Tambahan untuk  
setiap ANGGOTA  
KELUARGA sedarah  
semenda dalam  
garis keturunan  
lurus serta anak  
angkat yang menjadi  
tanggungan  
sepenuhnya  
MAKSIMAL 3  
ORANG

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada AWAL TAHUN kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender



# Status PTKP

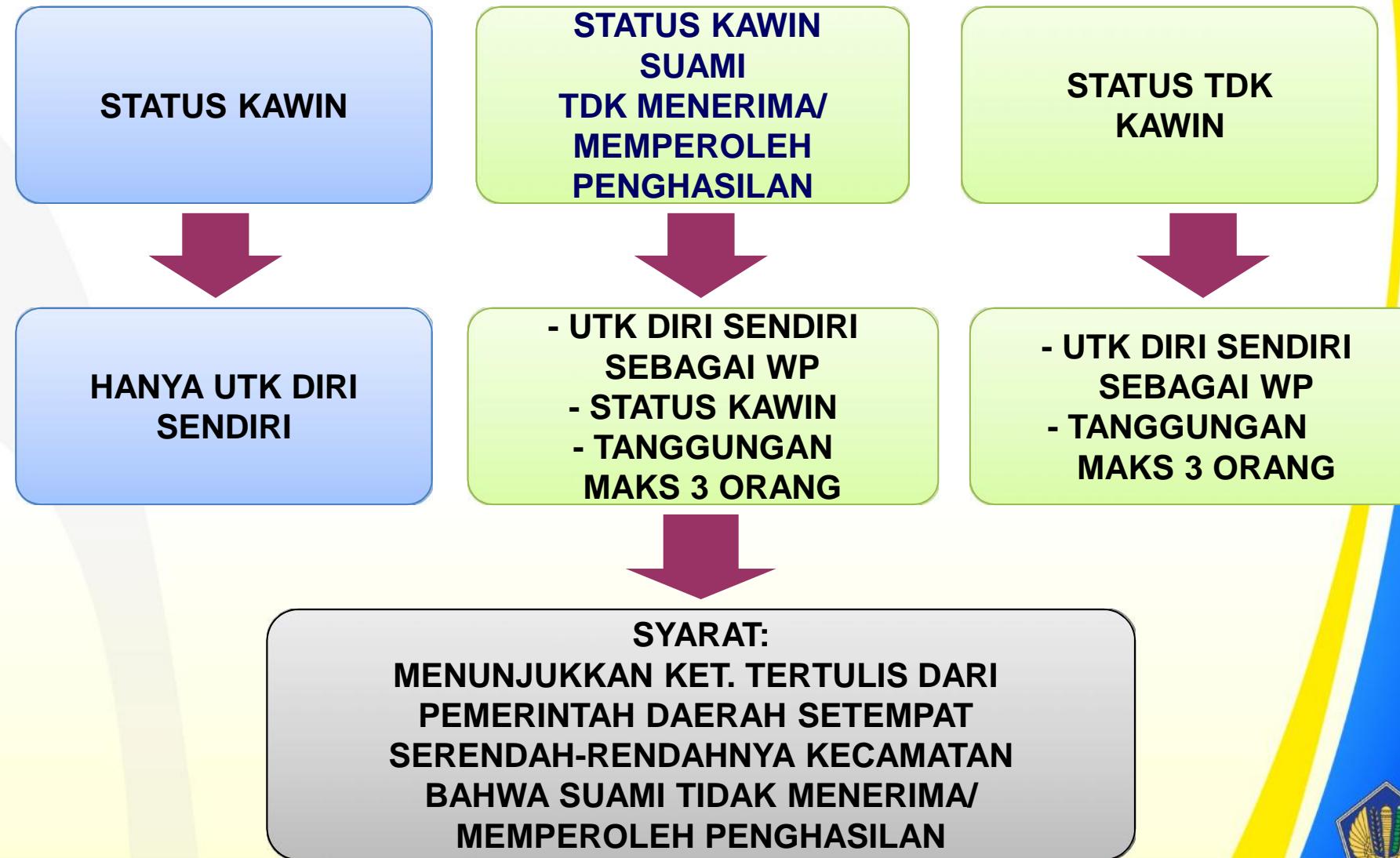
| WP Tidak Kawin | Kode | PTKP<br>Mulai 1 Januari 2016 |
|----------------|------|------------------------------|
| 0 Tanggungan   | TK/0 | 54.000.000                   |
| 1 Tanggungan   | TK/1 | 58.500.000                   |
| 2 Tanggungan   | TK/2 | 63.000.000                   |
| 3 Tanggungan   | TK/3 | 67.500.000                   |

| WP Kawin     | Kode | PTKP<br>Mulai 1 Januari 2016 |
|--------------|------|------------------------------|
| 0 Tanggungan | K/0  | 58.500.000                   |
| 1 Tanggungan | K/1  | 63.000.000                   |
| 2 Tanggungan | K/2  | 67.500.000                   |
| 3 Tanggungan | K/3  | 72.000.000                   |

| WP Kawin + Penghasilan Isteri Digabung<br>(Pasal 8 ayat (1) UU PPh) | Kode  | PTKP<br>Mulai 1 Januari 2016 |
|---|-------|------------------------------|
| 0 Tanggungan  | K/I/0 | 112.500.000                  |
| 1 Tanggungan  | K/I/1 | 117.000.000                  |
| 2 Tanggungan  | K/I/2 | 121.500.000                  |
| 3 Tanggungan  | K/I/3 | 126.000.000                  |



## PTKP UTK KARYAWATI



## BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN

|  | (MAKSIMAL)<br>SETAHUN | (MAKSIMAL)<br>SEBULAN |
|--|-----------------------|-----------------------|
| BIAYA JABATAN<br><br>5 % x<br>PENGHASILAN BRUTO<br>(GAJI)    | 6.000.000             | 500.000               |
| BIAYA PENSIUN<br><br>5 % x<br>PENGHASILAN BRUTO<br>(PENSIUN) | 2.400.000             | 200.000               |

## TARIF BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh)

KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):



| NO | Lapisan Penghasilan                        | Tarif |
|----|--|-------|
| 1. | S.d. Rp 50.000.000                         | 5%    |
| 2. | Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000 | 15%   |
| 3. | Di atas Rp250.000.000 - s.d.Rp500.000.000- | 25%   |
| 4. | Di atas Rp500.000.000                      | 30%   |

## TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

### PENGHASILAN



- PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
- PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENI KMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH  
(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
- IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU, IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
- ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRI BADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DI BENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRI BADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DI BENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
- BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

# PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA



PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,  
JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

DIBAYARKAN KEPADA

PEJABAT NEGARA/PNS/  
ANGGOTA TNI/POLRI/  
PENSIUNANNYA

- GAJI/PENSIUN  
- TUNJANGAN  
TERKAIT

TARIF PS.17  
X  
PENGHASILAN  
KENA PAJAK  
  
DITANGGUNG  
PEMERINTAH

HONORARIUM  
IMBALAN LAIN  
DGN NAMA APAPUN

0% (Gol. I & II),  
5% (Gol. III) atau  
15% (Gol. IV)  
X Ph Bruto  
(PPh Final)

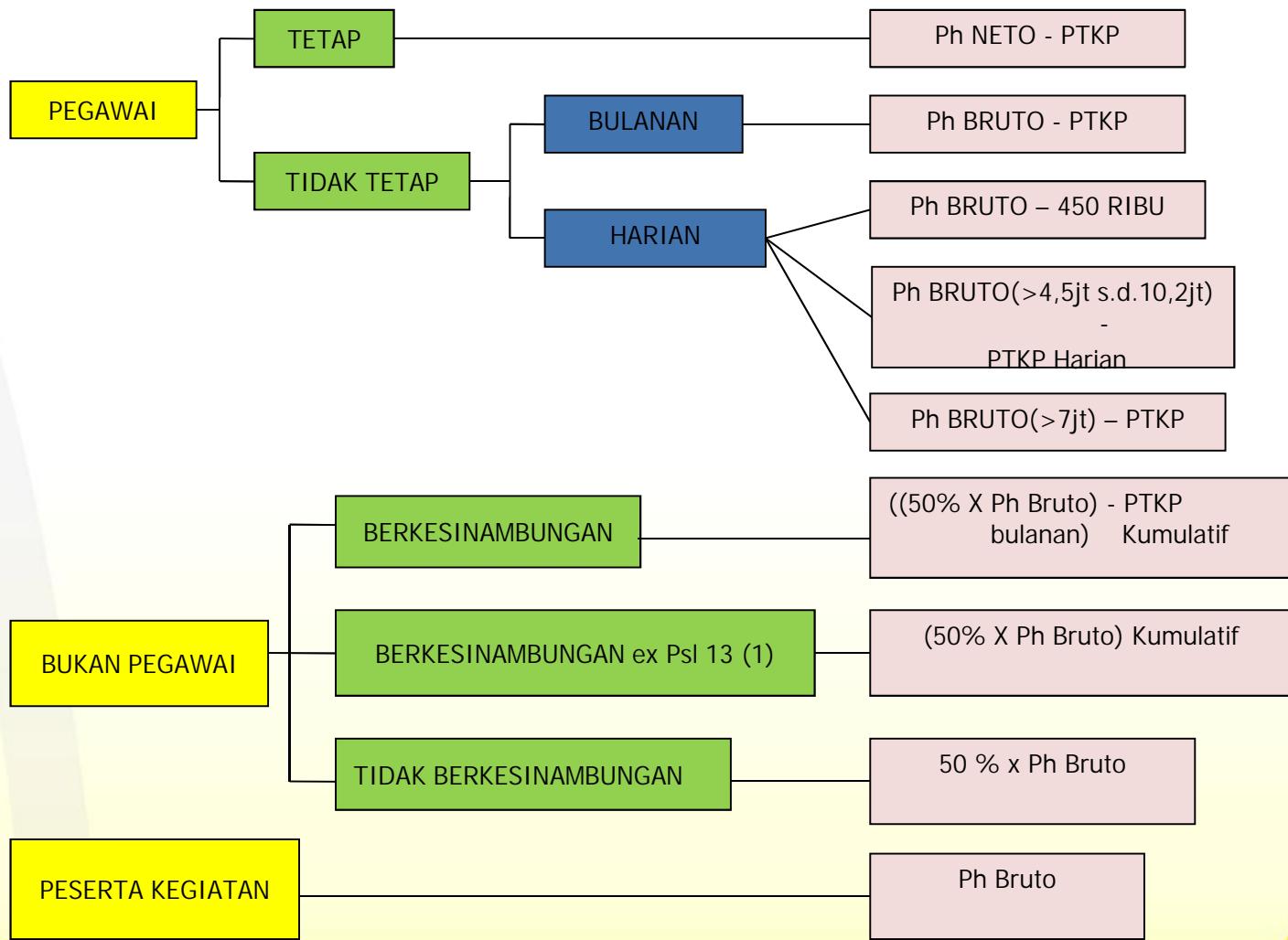
BUKAN PEJABAT  
NEG/PNS/ANGGOTA  
TNI/ANGGOTAPOLRI/PEN  
SIUNANNYA



# PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA



## BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA



# Penghitungan PPh Pasal 21

## PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD



# Disetahunkan vs Tidak Disetahunkan



# Disetahunkan vs Tidak Disetahunkan



# **Tarif Final Penghasilan Atas Honorarium Yang Bersumber dari APBN/APBD**

| <b>NO.</b> | <b>PENERIMA PENGHASILAN</b>  | <b>TARIF</b> | <b>Ket</b>                 |
|------------|--|--------------|----------------------------|
| 1.         | PNS Golongan I dan II<br>Anggota TNI dan Anggota POLRI<br>Golongan Pangkat Tamtama dan<br>Bintara, dan Pensiunannya          | 0%           | Dibuat Bukti<br>Pemotongan |
| 2.         | PNS Golongan III<br>Anggota TNI dan Anggota POLRI<br>Golongan Pangkat Perwira Pertama,<br>dan pensiunannya                   | 5%           | Dibuat Bukti<br>Pemotongan |
| 3.         | Golongan IV<br>Anggota TNI dan Anggota POLRI<br>Golongan Pangkat<br>Perwira Menengah dan Perwira<br>Tinggi, dan Pensiunannya | 15%          | Dibuat Bukti<br>Pemotongan |



**SELAIN PNS/TNI/POLRI/  
PEJABAT NEGARA/PENSUAN**

## **PESERTA KEGIATAN**

- 1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;**
- 2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI, SIDANG, PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA;**
- 3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;**
- 4. PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG;**
- 5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA**

**MENERIMA  
IMBALAN :**

**UANG SAKU, UANG  
REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,  
HADIAH DAN PENGHARGAAN**

**DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF  
PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH  
PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI  
PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK  
DIPECAH**



## Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

### Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Masa Pajak Maret 2016

|   |                               | Farianto   | Hartanto      | Satrio B      | Yugana        | Susanto       | Bayu          |               |
|---|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Gaji pokok                    | 5.870.000  | 5.240.000     | 5.620.200     | 5.570.700     | 5.750.500     | 5.235.500     |               |
|   | Tunjangan istri               | 587.000    | 524.000       | 562.020       | -             | 575.050       | 523.550       |               |
|   | Tunjangan anak                | 234.800    | 209.600       | 112.404       | -             | -             | -             |               |
|   | Tunjangan jabatan             | 840.000    | 740.000       | 520.000       | -             | 820.000       | -             |               |
|   | Tunjangan beras               | 248.000    | 248.000       | 149.000       | 99.500        | 149.000       | 149.000       |               |
|   | Pembulatan                    |            |               |               |               |               |               |               |
|   | Penghasilan bruto             | 7.779.800  | 6.961.600     | 6.963.624     | 5.670.200     | 7.294.550     | 5.908.050     |               |
| 2 | Pengurang                     |            |               |               |               |               |               |               |
|   | Biaya jabatan                 | 5%         | 388.990       | 348.080       | 348.181       | 283.510       | 364.728       | 295.403       |
|   | Iuran pensiun                 | 4,75%      | 317.861       | 283.746       | 298.995       | 264.608       | 300.464       | 273.555       |
|   |                               |            | 706.851       | 631.826       | 647.176       | 548.118       | 665.191       | 568.957       |
| 3 | Penghasilan neto              | 7.072.950  | 6.329.774     | 6.316.448     | 5.122.082     | 6.629.359     | 5.339.093     |               |
|   | Penghasilan neto disetahunkan | 84.875.394 | 75.957.288    | 75.797.378    | 61.464.981    | 79.552.307    | 64.069.112    |               |
| 4 | PTKP                          | K/3        | K/2           | K/1           | TK/0          | K/0           | K/0           |               |
|   | Untuk Wajib Pajak             | 54.000.000 | 54.000.000    | 54.000.000    | 54.000.000    | 54.000.000    | 54.000.000    |               |
|   | Status WP Kawin               | 4.500.000  | 4.500.000     | 4.500.000     |               | 4.500.000     | 4.500.000     |               |
|   | Tanggungan                    | 13.500.000 | 9.000.000     | 4.500.000     |               |               |               |               |
|   |                               | 72.000.000 | 67.500.000    | 63.000.000    | 54.000.000    | 58.500.000    | 58.500.000    |               |
| 5 | PKP                           | 12.875.394 | 8.457.288     | 12.797.378    | 7.464.981     | 21.052.307    | 5.569.112     |               |
|   | Pembulatan                    | 12.875.000 | 8.457.000     | 12.797.000    | 7.464.000     | 21.052.000    | 5.569.000     |               |
| 6 | PPh Pasal 21 setahun          | 5%         | 643.750       | 422.850       | 639.850       | 373.200       | 1.052.600     | 278.450       |
|   | PPh Pasal 21 sebulan          |            | 53.646        | 35.238        | 53.321        | 31.100        | 87.717        | 23.204        |
|   | Tambahan 20% lebih tinggi     |            | -             | -             | -             | -             | -             | 4.641         |
|   | Bagi yang belum ber-NPWP      |            |               |               |               |               |               |               |
|   | <b>Total PPh Pasal 21</b>     |            | <b>53.646</b> | <b>35.238</b> | <b>53.321</b> | <b>31.100</b> | <b>87.717</b> | <b>27.845</b> |



Tabel 3. Penghitungan PPh Pasal 21 rapel kenaikan gaji berkala Hartanto

| <b>PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala Hartanto</b>         |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| 1 Gaji pokok  |            |            | 5.340.000  |
| Tunjangan istri   |            |            | 534.000    |
| Tunjangan anak  |            |            | 213.600    |
| Tunjangan jabatan   |            |            | 740.000    |
| Tunjangan beras   |            |            | 248.000    |
| Pembulatan  |            |            |            |
| Penghasilan bruto   |            |            | 7.075.600  |
| 2 Pengurang   |            |            |            |
| Biaya jabatan ( $5\% \times 7.075.600$ )                              | 353.780    |            |            |
| Iuran pensiun ( $4,75\% \times 6.087.600$ )                           | 289.161    | 642.941    |            |
| 3 Penghasilan neto  |            |            | 6.432.659  |
| Penghasilan neto disetahunkan   |            |            | 77.191.908 |
| 4 PTKP (K/2)  |            |            |            |
| Untuk Wajib Pajak   | 54.000.000 |            |            |
| Status WP Kawin   | 4.500.000  |            |            |
| Tanggungan  | 9.000.000  | 67.500.000 |            |
| 5 PKP   |            |            | 9.691.908  |
| Pembulatan  |            |            | 9.691.000  |
| 6 PPh Pasal 21 setahun ( $5\% \times 9.691.000$ )                     |            |            | 484.550    |
| PPh Pasal 21 sebulan ( $484.550 : 12$ )                               |            |            | 40.379     |
| 7 PPh Pasal 21 Jan-Mar yang seharusnya dipotong ( $3 \times 40.379$ ) |            |            | 121.138    |
| PPh Pasal 21 Jan-Mar yang sudah dipotong ( $3 \times 35.238$ )        |            |            | 105.714    |
| PPh Pasal 21 atas rapel   |            |            | 15.424     |



Tabel 7. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji 13 pada Kantor Imigrasi Yogyakarta

|   |                               | Farianto      | Hartanto      | Satrio B      | Bayu          |
|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Gaji pokok                    | 5.870.000     | 5.340.000     | 5.620.200     | 5.235.500     |
|   | Tunjangan istri               | 587.000       | 534.000       | 562.020       | 523.550       |
|   | Tunjangan anak                | 234.800       | 213.600       | 112.404       | -             |
|   | Tunjangan jabatan             |               | 740.000       | 520.000       | -             |
|   | Tunjangan beras               | 248.000       | 248.000       | 149.000       | 149.000       |
|   | Pembulatan                    |               |               |               |               |
|   | Penghasilan bruto             | 6.939.800     | 7.075.600     | 6.963.624     | 5.908.050     |
| 2 | Pengurang                     |               |               |               |               |
|   | Biaya jabatan                 | 5%            | 346.990       | 353.780       | 348.181       |
|   | Iuran pensiun                 | 4,75%         | 317.861       | 289.161       | 298.995       |
|   |                               |               | 664.851       | 642.941       | 647.176       |
|   |                               |               |               |               | 568.957       |
| 3 | Penghasilan neto              | 6.274.950     | 6.432.659     | 6.316.448     | 5.339.093     |
|   | Penghasilan neto disetahunkan | 75.299.394    | 77.191.908    | 75.797.378    | 64.069.112    |
| 4 | PTKP                          | K/3           | K/2           | K/1           | K/0           |
|   | Untuk Wajib Pajak             | 54.000.000    | 54.000.000    | 54.000.000    | 54.000.000    |
|   | Status WP Kawin               | 4.500.000     | 4.500.000     | 4.500.000     | 4.500.000     |
|   | Tanggungan                    | 13.500.000    | 9.000.000     | 4.500.000     |               |
|   |                               | 72.000.000    | 67.500.000    | 63.000.000    | 58.500.000    |
| 5 | PKP                           | 3.299.394     | 9.691.908     | 12.797.378    | 5.569.112     |
|   | Pembulatan                    | 3.299.000     | 9.691.000     | 12.797.000    | 5.569.000     |
| 6 | PPh Pasal 21 setahun          | 5%            | 164.950       | 484.550       | 639.850       |
|   | PPh Pasal 21 sebulan          |               | 13.746        | 40.379        | 53.321        |
|   | Tambahan 20% lebih tinggi     |               | -             | -             | 4.641         |
|   | Bagi yang belum ber-NPWP      |               |               |               |               |
|   | <b>Total PPh Pasal 21</b>     | <b>13.746</b> | <b>40.379</b> | <b>53.321</b> | <b>27.845</b> |



## Pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final

| area staples   |   |  |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
| <br>KEMENTERIAN KEUANGAN RI<br>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  |   | <b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK<br/>PENGHASILAN PASAL 21<br/>(FINAL)</b>   |                                  |
|  |   | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>FORMULIR 1721 - VII<br>Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan<br>Lembar 2 : Untuk Pemotong |                                  |
|  |   | NOMOR : H.01 1 . 4 - 03 - 16 - 0000001   |                                  |
| <b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>   |   |  |                                  |
| 1. NPWP : A.01 07.777.440.5  |   | - 541 - 000  | 2. NIK / NO. PASPOR : A.02 _____ |
| 3. NAMA : A.03 Farianto  |   |  |                                  |
| 4. ALAMAT : A.04 Jl. Affandi No 54, Yogyakarta   |   |  |                                  |
| <b>B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG</b>   |   |  |                                  |
| KODE OBJEK PAJAK   | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO<br>(Rp)        | TARIF  | PPh DIPOTONG<br>(Rp)             |
| (1)  | (2)                                     | (3)  | (4)                              |
| 21 - 402 - 01  | 2.300.000                               | 15%  | 345.000                          |
| <b>C. IDENTITAS PEMOTONG</b>   |   |  |                                  |
| 1. NPWP : C.01 00.030.485.6  | - 541 - 000                             | 3. TANGGAL & TANDA TANGAN  |                                  |
| 2. NAMA : C.02 BENDAHARA KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA  | C.03 25 - 03 - 2014<br>(dd - mm - yyyy) |   |                                  |
| <b>KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)</b>   |   |  |                                  |
| 1. 21 - 401 - 01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus<br>2. 21 - 401 - 02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibauarkan Sekaligus<br>3. 21 - 402 - 01 Honor dan Imbalan Lain yang Diberikan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunnya<br>4. 21 - 499 - 99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya |   |  |                                  |



## Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Daerah yang mulai bekerja dalam tahun berjalan

Hapid Abdul Goffar merupakan pejabat daerah pada sebuah lembaga daerah yang baru diangkat pada bulan Juli 2016, telah menikah dengan 4 orang tanggungan anak dan telah memiliki NPWP. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan statusnya sebagai pejabat negara:

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Gaji Kehormatan   | Rp 30.000.000,00 |
| Tunjangan Istri   | Rp 3.000.000,00  |
| Tunjangan Anak    | Rp 500.000,00    |
| Tunjangan Jabatan | Rp 10.000.000,00 |

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Juli sampai dengan Masa Pajak November 2016 dihitung sebagai berikut:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Gaji Kehormatan          | Rp 30.000.000,00          |
| Tunjangan Istri          | Rp 3.000.000,00           |
| Tunjangan Anak           | Rp 500.000,00             |
| Tunjangan Jabatan        | <u>Rp 10.000.000,00</u> + |
| Jumlah penghasilan bruto | Rp 43.500.000,00          |

Pengurangan:

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| 1. Biaya Jabatan = 5% X Rp 43.500.000,00 atau maksimum<br>Rp. 500.000,00 per bulan | = | Rp 500.000,00            |
| 2. Iuran Pensiun = 4,75% X Rp 33.500.000,00  | = | <u>Rp 1.591.250,00</u> + |
|  |   | Rp 2.091.250,00 -        |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Penghasilan neto | Rp 41.408.750,00 |
|------------------|------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| Penghasilan neto setahun: 6 x Rp 41.408.750,00 = | Rp 248.452.500,00 |
|--|-------------------|

|   |                           |
|---|---------------------------|
| PTKP (K/3)  |                           |
| - untuk Wajib Pajak                                 | Rp 54.000.000,00          |
| - status WP Kawin                                   | Rp 4.500.000,00           |
| - tambahan 3 orang tanggungan (3 x Rp 4.500.000,00) | <u>Rp 13.500.000,00</u> + |
|   | Rp 72.000.000,00 -        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp 176.452.500,00 |
| Pembulatan PKP               | Rp 176.452.000,00 |

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp 50.000.000,00 | = | Rp 2.500.000,00           |
| 15% x Rp 126.452.000,00                      | = | <u>Rp 18.967.800,00</u> + |

|   |                  |
|---|------------------|
| PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan | Rp 21.467.800,00 |
| PPh Pasal 21 sebulan: Rp 21.467.800,00/6      | Rp 3.577.967,00  |



Aprinta, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c, menduduki eselon IVa status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP A), menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dalam tahun 2017 sebagai berikut:

|                          |    |                   |
|--------------------------|----|-------------------|
| Gaji dan tunjangan       | Rp | 7.000.000,00      |
| Tunjangan Istri          | Rp | 700.000,00        |
| Tunjangan Anak           | Rp | 175.000,00        |
| Tunjangan Jabatan        | Rp | 1.000.000,00      |
| Tunjangan Beras          | Rp | <u>200.000,00</u> |
| Jumlah penghasilan bruto | Rp | 9.075.000,00      |

Penghasilan disetahunkan:  $12 \times \text{Rp}9.075.000,00$  Rp 108.900.000,00

**PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun Rp 1.314.100,00**

pada bulan Juli 2010 menerima gaji dan tunjangan ke-13 dengan rincian sebagai berikut:

|                          |    |                     |
|--------------------------|----|---------------------|
| Gaji Pokok               | Rp | 7.000.000,00        |
| Tunjangan Istri          | Rp | 700.000,00          |
| Tunjangan Anak           | Rp | 175.000,00          |
| Tunjangan Jabatan        | Rp | <u>1.000.000,00</u> |
| Jumlah penghasilan bruto | Rp | 8.875.000,00        |

**Jumlah penghasilan termasuk gaji dan tunjangan ke-13 Rp 117.775.000,00**

Pengurangan Biaya Jabatan  
 $5\% \times \text{Rp } 117.775.000,00$  = Rp 5.888.750,00  
Iuran pensiun  
 $12 \times 4,75\% \times \text{Rp } 7.875.000,00$  = Rp 4.488.750,00 +

**Jumlah pengurang Penghasilan neto setahun Rp 10.377.500,00  
Rp 107.397.500,00**

PTKP (K/3)  
untuk Wajib Pajak Rp 54.000.000,00  
status WP Kawin Rp 4.500.000,00  
tambahan 3 orang tanggungan  
( $3 \times \text{Rp. } 1.320.000,00$ ) Rp 13.500.000,00 +  
  
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 72.000.000,00 -  
Pembulatan Rp 35.397.500,00  
Rp 35.397.000,00

PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan:  
 $5\% \times \text{Rp } 35.397.000,00$  = 1.769.850,00

**PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan ke-13:  
Rp 1.769.850,00 - Rp 1.314.100,00 = Rp 455.750,00**





KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI  
REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU  
PENSIUNNYA**

NOMOR : H.01 1 . 2 - 12 - 16 - 0000001

**FORMULIR 1721-A2**

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan  
Lembar 2 : Untuk Pendamping

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN (mm - mm)  
01 - 12

NAMA INSTANSI  
BADAN LAIN : H.05 Bendahara Kanwil Kemenag DIY

NPWP  
BENDAHARA : H.05

NAMA  
BENDAHARA : H.06 Setiawan Taru

00.035.596.7 - 541 - 000

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

|  |  |
|--|--|
| 1 NPWP : <u>A.01</u> 07.777.440.5 - 541 - 000              | 6 JENIS KELAMIN : <u>A.07</u> <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN |
| 2 NIP / NRP : <u>A.02</u> 19700509 199501 1 001            | 7 NK : <u>A.09</u>   |
| 3 NAMA : <u>A.03</u> Farianto                              | 8 STATUS/UMUR/TANGGUNGJUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP   |
| 4 PANGKAT/ GOLONGAN : <u>A.04</u> Pembina / <u>A.05</u> Ma | K/ <u>3</u> A.10 TK/ <u>A.11</u> HB/ <u>A.12</u>   |
| 5 ALAMAT : <u>A.06</u> Jl. Affandi No 54<br>Yogyakarta     | 9 NAMA JABATAN : <u>A.13</u>   |

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPn PASAL 21**

| KODE OBJEK PAJAK : | URAIAN   | JUMLAH (Rp) |
|--------------------|--|-------------|
|                    | PENGHASILAN BRUTO  |             |
| 1.                 | GAJI POKOK/PENSUIN   | 76.310.000  |
| 2.                 | TUNJANGAN ISTERI   | 7.631.000   |
| 3.                 | TUNJANGAN ANAK   | 3.052.400   |
| 4.                 | JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)  | 86.953.400  |
| 5.                 | TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN  | -           |
| 6.                 | TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL  | 29.520.000  |
| 7.                 | TUNJANGAN BERAS  | 3.224.000   |
| 8.                 | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)  | 119.737.400 |
| 9.                 | TUNJANGAN LAIN-LAIN  | -           |
| 10.                | PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISSAH DARI PEMBAYARAN GAJI      | -           |
| 11.                | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)   | 119.737.400 |
|                    | PENGURANGAN  |             |
| 12.                | BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUIN  | 5.986.870   |
| 13.                | IURAN PENSUIN ATAU IURAN THIJIHT   | 4.132.187   |
| 14.                | JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)  | 10.119.057  |
|                    | PENGHITUNGAN PPn PASAL 21  |             |
| 15.                | JUMLAH PENGHASILAN NETTO (11 - 14)   | 109.618.344 |
| 16.                | PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA   | -           |
| 17.                | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPn PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)               | -           |
| 18.                | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)  | 72.000.000  |
| 19.                | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)  | 37.618.000  |
| 20.                | PPn PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN                                | 1.880.900   |
| 21.                | PPn PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA                                       | -           |
| 22.                | PPn PASAL 21 TERUTANG  | 1.880.900   |
| 23.                | PPn PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI  | 1.880.900   |
| 23A.               | ATAS GAJI DAN TUNJANGAN  |             |
| 23B.               | ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISSAH DARI PEMBAYARAN GAJI |             |

C. PEGAWAI TERSEBUT :  DIPINDAHKAN  PINDAHAN  BARU  PENSUIN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

|  |   |
|--|---|
| 1. NPWP : <u>D.01</u> 00.035.596.7 - 541 - 000 | 3. TANGGAL & TANDA TANGAN   |
| 2. NAMA : <u>D.02</u> Setiawan Taru            | <u>D.03</u> 09 - 01 - 2017<br>(dd-mm-yy)  |
| 3. NIP/RNI : <u>D.04</u> 19700619 199103 1 002 |  |



## Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

| Jenis Pajak   | Tanggal Penyetoran   | Tanggal Pelaporan   |
|---|--|---|
| PPh Pasal 21  | Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.               | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir                 |
| PPh Pasal 22 yang dipungut KPA atau PPSPM sebagai Pemungut PPh Pasal 22 | Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN | Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir                 |
| PPh Pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran                        | Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran                                    | Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir                 |
| PPh Pasal 4 ayat (2)  | Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir                | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir                 |
| PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut PPSPM sebagai Pemungut PPN         | Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN | Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. |



| Jenis Pajak  | Tanggal Penyetoran   | Tanggal Pelaporan  |
|--|--|--|
| PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut Bendahara Pengeluaran | Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN | Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir |
| PPh Pasal 23   | Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir                                  | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir                |



# PENGISIAN DALAM SPT MASA PPh PASAL 21 (FORM SPT 1721)

1721

1721 – I  
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26  
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA

Wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember.

Berfungsi sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26  
(Rekapitulasi 1721A1/A2)

1721A1/A2 tetap diberikan kepada pegawai oleh pemberi kerja

1721 – II  
DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP

Wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP

1721 – T  
DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA

Wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.



PAJAK PENGHASILAN

# PASAL

22

OBJEK

pembelian barang, seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang

TARIF

1,5% x Harga Beli *(tidak termasuk PPN)*

KECUALI

pembelian barang dengan nilai pembelian **paling banyak Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) dengan **tidak dipecah-pecah** dalam beberapa faktur

pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos

pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan **penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**



# TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang  
Dari APBN/APBD

Dipungut Pada Setiap  
Pelaksanaan Pembayaran

Disetor Dengan SSP Pada Hari yg sama  
ke Bank Persepsi/ Kantor Pos

SSP Diisi Oleh dan Atas Nama  
Rekanan. Ditandatangani  
oleh Bendaharawan  
sebagai bukti pemungutan

Lapor selambat-lambatnya 14 hari setelah masa Pajak berakhir



# **CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22**

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

## **Penghitungan PPh Pasal 22**

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

$$\text{Rp } 11.000.000,- \times 100/110 \times 1,5\% = \text{Rp } 150.000,-$$

\*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka

PPh pasal 22 terutang :

$$\text{Rp } 11.000.000,- \times 100/110 \times 1,5\% \times 200\% = \text{Rp} 300.000,-$$



# PPh Pasal 23



# **PEMOTONG PPh PASAL 23/26**

Peraturan Menkeu No.141/PMK.03/2015

**BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT  
BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH  
BANDAN**

**YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN  
ATAS OBJEK PPh Pasal 23**



# PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN

## PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:

- JASA TEKNIK;
- JASA MANAJEMEN;
- JASA KONSULTAN HUKUM,
- JASA KONSULTAN PAJAK,
- JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

YANG BERASAL DARI MODAL :

- DEVIDEN
- BUNGA
- ROYALTI



# TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23



WAJIB PAJAK



ORANG PRIBADI /  
BADAN

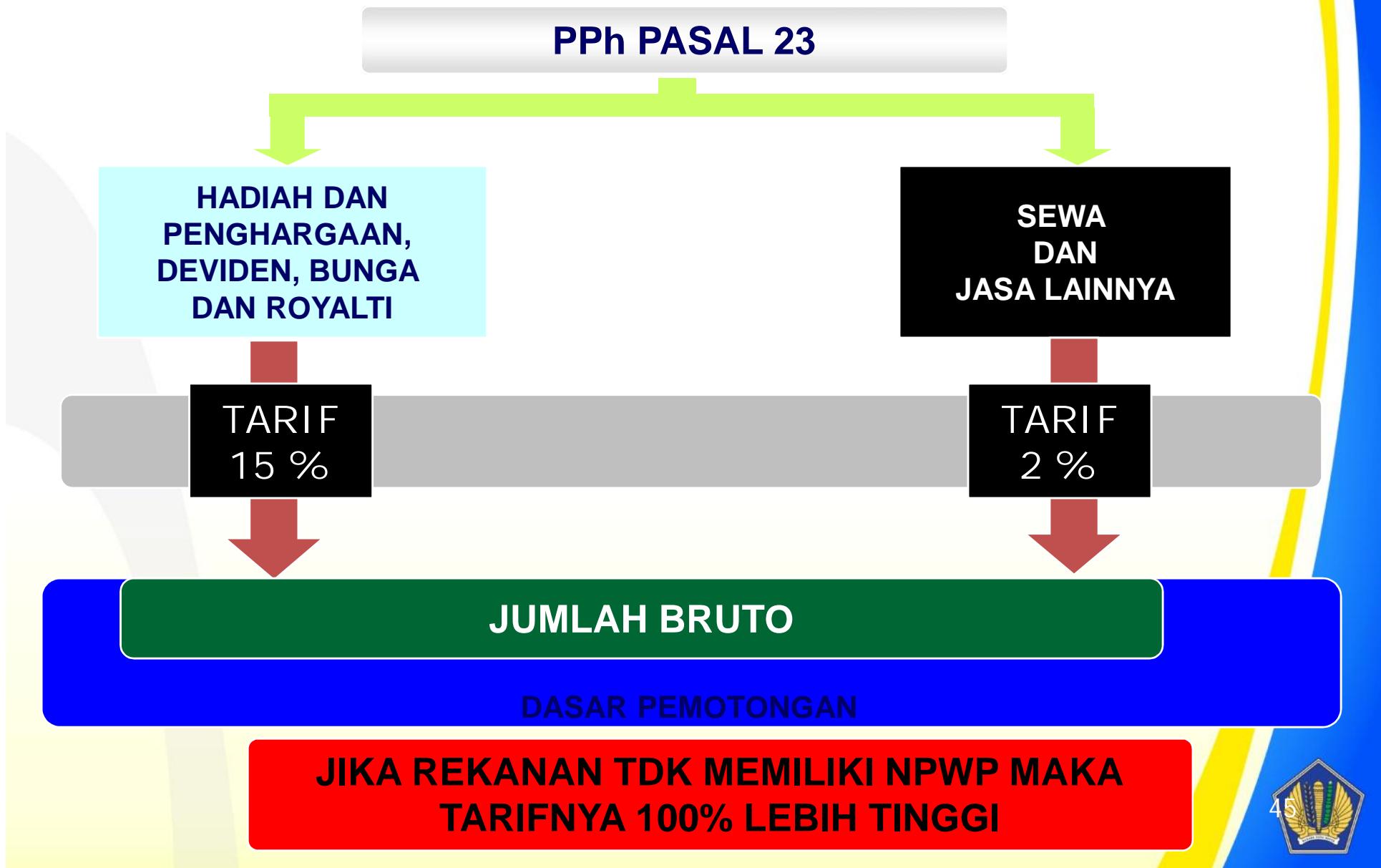


YG DAPAT MENUNJUKKAN  
SKB PEMOTONGAN  
PPh PASAL 23/26

YG MELAKSANAKAN  
PROYEK PEMERINTAH YG  
DIDANAI HIBAH ATAU  
PINJAMAN LN



# TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN



# JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23

JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.

TIDAK TERMASUK

1. PEMBAYARAN GAJI , UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB);
2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);
2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );
4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA

kecuali

Jasa Catering &  
Jasa Yg telah dikenakan PPh bersifat final (konstruksi)

# TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23

DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN  
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN

## BUKTI PEMOTONGAN

F.1.1.33.06 atau  
F.1.1.33.07

1 UNTUK REKANAN

2 LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26

3 ARSIP BENDAHARA/BADAN



## PENYETORAN PPh PASAL 23



PALING LAMBAT TGL 10 BULAN  
BERIKUTNYA



JIKA JATUH PD  
HARI LIBUR



PD HARI KERJA  
BERIKUTNYA

## TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23



MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR  
SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)  
RANGKAP 2



### LAMPIRAN

- \* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
- \* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
- \* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN



SELAMBAT-LAMBATNYA  
20 HARI SETELAH  
BULAN TAKWIM BERAKHIR



# Pasal 26

## PPh Wajib Pajak Luar Negeri



Tarif :  
20% atau ditentukan lain dalam  
P3B



# PPh Pasal 4 Ayat 2



# PEMOTONG PPH PASAL 4 AYAT (2)

## Pasal 4 AYAT (2) UU PPh & PP



# TATA CARA PEMOTONGAN DAN PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

WP ORANG PRIBADI ATAU BADAN

MENERIMA PENGHASILAN SEWA TANAH / BANGUNAN BERUPA :

Tanah, Rumah, Rumah Susun, Apartemen, Kondominium, Gedung Perkantoran, Gedung Pertokoan, atau Gedung Pertemuan termasuk bagiannya, Rumah Kantor, Rumah Toko, Gudang dan Bangunan Industri

DIKENAKAN PPh FINAL  
10% X JUMLAH BRUTO NILAI  
SEWA

**JUMLAH BRUTO NILAI SEWA** adalah semua jumlah yg dibayarkan atau terutang oleh pihak yg menyewa dgn nama dan dlm bentuk apapun yg berkaitan dgn tanah dan/atau bagunan yg disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yg perjanjiannya dibuat scr terpisah maupun yg disatukan dgn perjanjian persewaannya.

Tidak termasuk sewa tanah/bangunan adalah Fasilitas Penginapan, Pelayanan Penunjang, dan Ruangan untuk Kegiatan Acara atau Pertemuan di Hotel



PAJAK PENGHASILAN

# PASAL

# 4(2)

OBJEK

penghasilan dari **pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan** meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati

**perjanjian pengikatan jual beli** atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

TARIF

**2,5% x Jumlah Bruto** (*Nilai Pengalihan*)

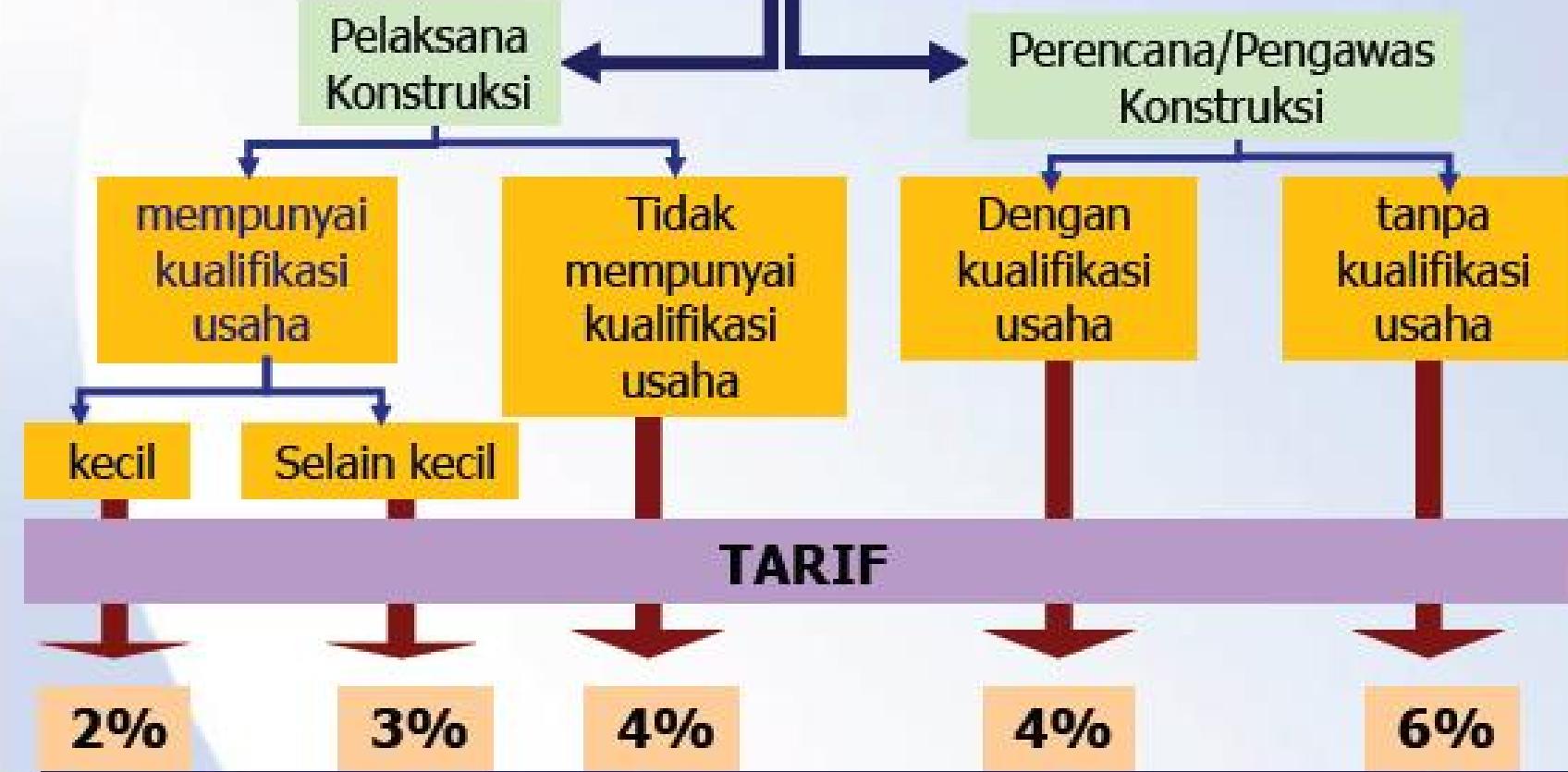
**0%** atas pengadaan tanah bagi **pembangunan untuk kepentingan umum**

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN



# JASA KONSTRUKSI

PPh bersifat final



# PPN



# PENGERTIAN

PAJAK  
PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN)

PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH  
(PPn BM)

PAJAK YG DIKENAKAN  
ATAS KONSUMSI  
BARANG DAN JASA

PAJAK YG DIKENAKAN  
ATAS KONSUMSI BARANG  
YG BERDSRKAN KMK  
TERGOLONG BRG MEWAH

DI DALAM

DAERAH PABEAN

WILAYAH RI YG DI DALAMNYA  
BERLAKU PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN



# PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

# PPN

## OBJEK

penyerahan **Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak** oleh rekanan (Pengusaha Kena Pajak)

## TARIF

**10% x Dasar Pengenaan Pajak**

## KECUALI

pembayaran yang jumlahnya **paling banyak Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah) dan **tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah**

pembayaran untuk **pembebasan tanah**, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh *real estate* atau *industrial estate*

pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas **PPN tidak dipungut** dan/atau **dibebaskan dari pengenaan PPN**

pembayaran atas penyerahan BBM dan Bukan BBM oleh Pertamina, rekening telefon, jasa angkutan udara oleh perusahaan penerbangan



# SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM

## PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM



SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA  
KEPADА PKP REKANAN



DASAR PEMUNGUTAN  
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA  
TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

### CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM

PPN YG DIPUNGUT  
10/110

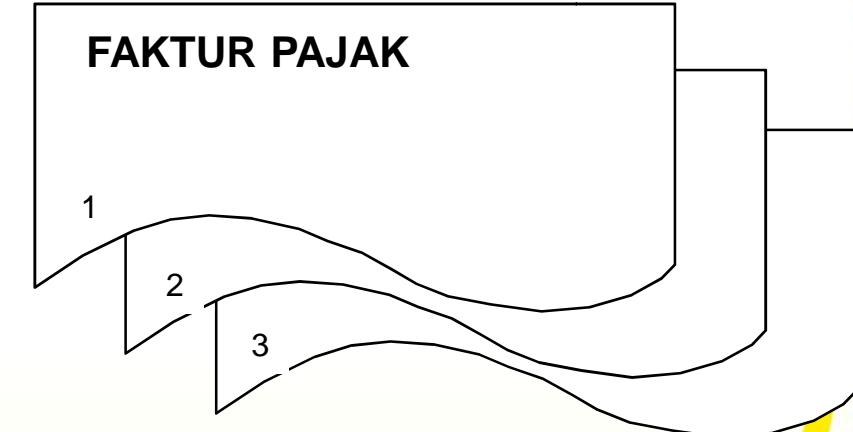
TERUTANG PPn BM 20%

YG DIPUNGUT  
• PPN 10/130  
• PPn BM 20/130



# TATA CARA PEMUNGUTAN

REKANAN MENYAMPAIKAN  
TAGIHAN KEPADA BENDAHARA



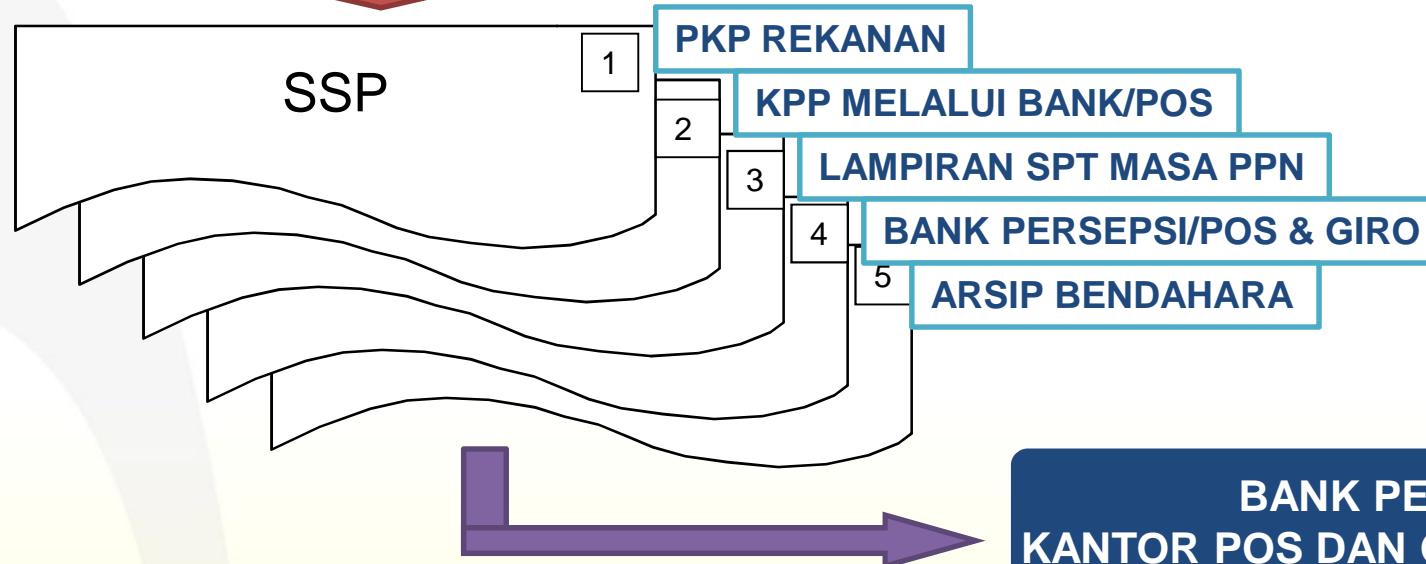
DICAP OLEH BENDAHARA  
DISETOR TGL ..... DAN  
DITANDATANGANI BENDAHARA



# TATA CARA PENYETORAN

## PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARA

DISETOR



BANK PERSEPSI/  
KANTOR POS DAN GIRO Melalui KPPN

- pada hari yang sama jika dibayar oleh PPSPM
- 7 hari setelah tanggal pembayaran oleh Bend Pengeluaran

# TATA CARA PELAPORAN

## PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA

LAPORAN  
PEMUNGUTAN  
PPN/PPn BM

1  
2  
3

KPP DGN DILAMPIRI  
FP LEMBAR KE-3  
ATASAN BENDAHARA  
ARSIP BENDAHARA\*)

\*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM  
ADALAH BENDAHARA PEMERINTAH  
PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH  
ARSIP BENDAHARA

SELAMBAT-LAMBATNYA  
AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH  
MASA PAJAK BERAKHIR

DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA  
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR JATUH  
PADA HARI LIBUR PELAPORAN  
DILAKUKAN PADA HARI KERJA  
BERIKUTNYA

DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG "KASIR"  
DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN  
SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT  
DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS



# PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH

## DALAM HAL PEMBAYARAN

TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM  
DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH

BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH  
PERTAMINA

ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN  
PENERBANGAN

ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU  
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

UNTUK PEMBEBAAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS  
PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN  
TDK DIPUNGUT



# Bea Meterai



# BEA METERAI

# BM

## OBJEK

**Surat perjanjian** dan surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata (seperti kontrak atau surat pernyataan)

**Surat yang memuat jumlah uang**, seperti kuitansi, *billing statement*, dan lain-lain

## TARIF

Rp6.000,00

Rp3.000,00

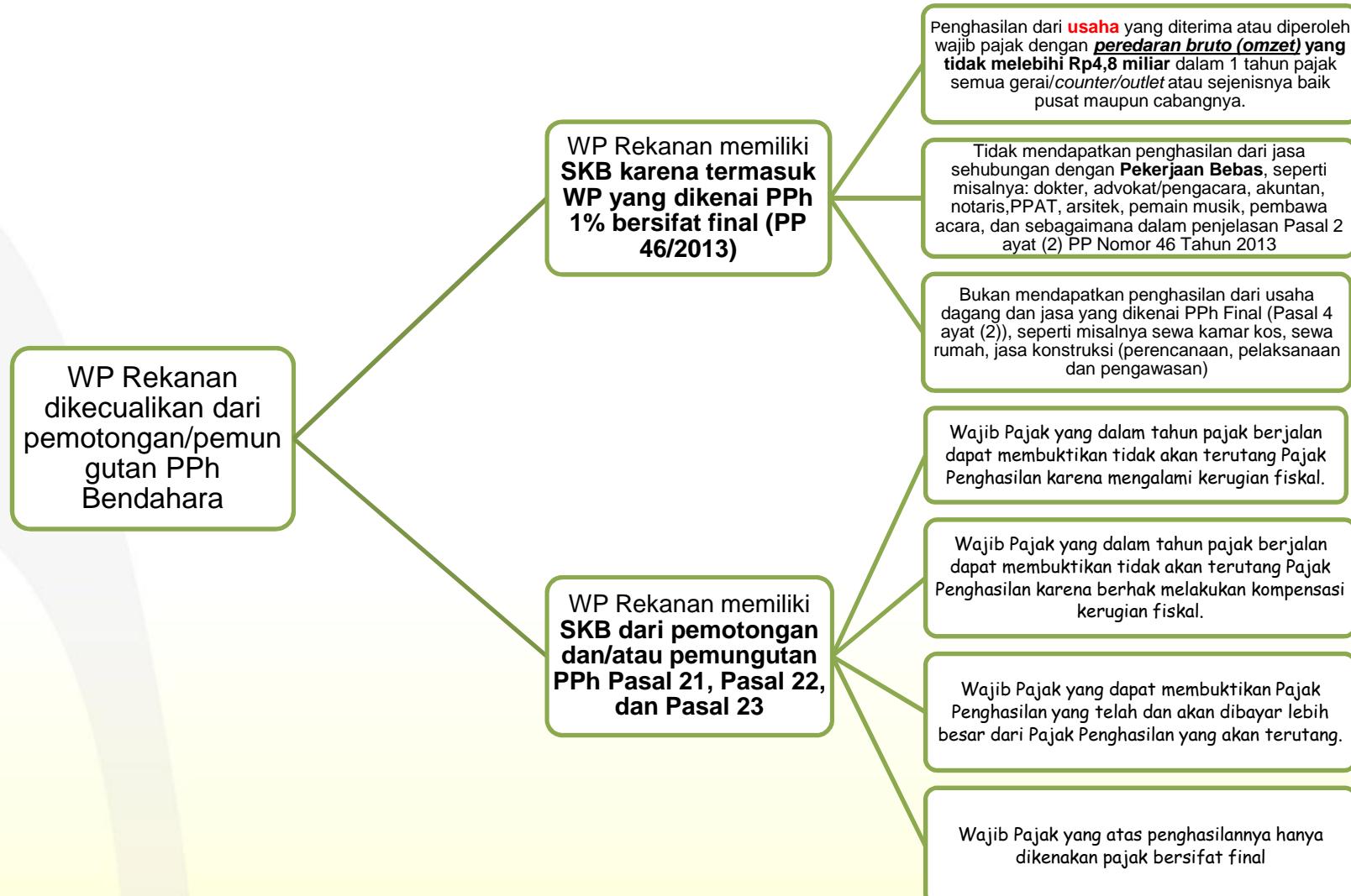
*khusus surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00*



## Pengecualian dari Pemotongan dan Pemungutan PPh Bendahara



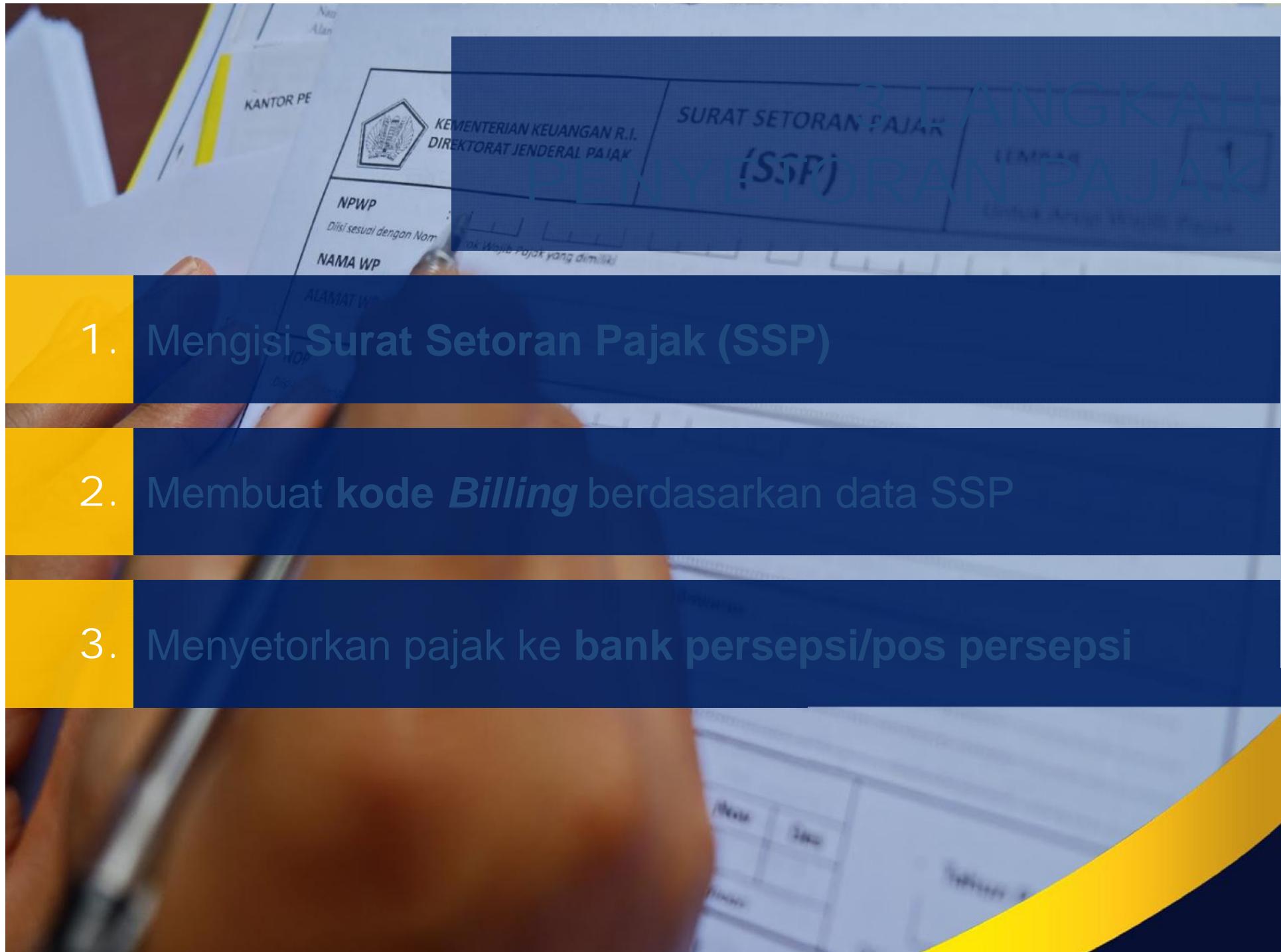
## WP Rekanan yang Dikecualikan dari Pemotongan dan/atau pemungutan PPh





PENYETORAN PAJAK KE KAS NEGARA





1. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)
2. Membuat kode **Billing** berdasarkan data SSP
3. Menyetorkan pajak ke bank persepsi/pos persepsi

| KODE AKUN PAJAK –<br>KODE JENIS SETORAN |   |
|---|---|
| 411121 - 100                            | Pemotongan PPh Pasal 21 Non Final   |
| 411121 - 402                            | Pemotongan PPh Pasal 21 Final atas honorarium/timbangan yg diterima Pejabat Negara, PNS, TNI/POLRI, dan pensiunan yg  |
| 411122 - 910                            | Pemungutan <b>PPh Pasal 22</b> oleh Bendaharawan APBN/ (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)      |
| 411122 - 920                            | Pemungutan <b>PPh Pasal 22</b> oleh Bendaharawan APBD/ (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)      |
| 411122 - 930                            | Pemungutan <b>PPh Pasal 22</b> oleh Bendaharawan Dana Desa/ (SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara) |

KODE AKUN PAJAK –  
KODE JENIS SETORAN

411124 - 100

411124 - 104

411128 - 402

411128 - 403

411128 - 409

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
KETERANGAN  
(SSP)

Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa

Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa

Pemotongan **PPh Final Pasal 4(2)** atas pengalihan hak atas tanah / bangunan

Pemotongan **PPh Final Pasal 4(2)** atas sewa tanah / bangunan

Pemotongan **PPh Final Pasal 4(2)** atas jasa konstruksi

KODE AKUN PAJAK –  
KODE JENIS SETORAN

411211 - 910

411211 - 920

411211 - 930

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK  
KETERANGAN  
(SSP)

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBD\*  
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan APBD\*  
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

Pemungutan **PPN** oleh Bendaharawan Dana Desa\*  
(SSP atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara)

\*) Mengacu pada jabatan bendaharawan **pada tingkat administrasi pemerintahan**, dan  
TIDAK didasarkan pada sumber dana pengelolaan keuangan

## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)

- billing-djp pada KPP / KP2KP
- billing-batch DJP untuk pembuatan kode *billing* massal

## SURAT SETORAN PAJAK NON-DJP & INTERNET

- [sse.pajak.go.id](http://sse.pajak.go.id)
- [sse2.pajak.go.id](http://sse2.pajak.go.id)
- [sse3.pajak.go.id](http://sse3.pajak.go.id)
- Petugas Bank/Pos Persepsi (***Customer Service/Teller***) tertentu
- SMS ID Billing Telkomsel (\*141\*500#)
- *Internet Banking* (bank tertentu)
- *Application Service Provider*

## SALURAN PEMBUATAN KODE BILLING

## PEMOTONGAN PPh Pasal 21, 23, 4(2)

- SSP lembar ke-1  
Arsip Bendahara
- SSP lembar ke-2  
Arsip KPPN
- SSP lembar ke-3  
Dilaporkan ke KPP oleh Bendahara
- SSP lembar ke-4  
Arsip Bank/Pos Persepsi
- Bukti Potong untuk penerima  
penghasilan/pegawai/rekanan

## SURAT SETORAN PADA PEMUNGUTAN (SSP) PPh Pasal 22 dan PPN

- SSP lembar ke-1  
Arsip Rekanan
- SSP lembar ke-2  
Arsip KPPN
- SSP lembar ke-3  
Dilaporkan ke KPP oleh Rekanan
- SSP lembar ke-4  
Arsip Bank/Pos Persepsi
- SSP lembar ke-5  
Arsip Bendahara

SSP DAN BUKTI POTONG

## Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

| Jenis Pajak   | Tanggal Penyetoran   | Tanggal Pelaporan   |
|---|--|---|
| PPh Pasal 21  | Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.               | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir                 |
| PPh Pasal 22 yang dipungut KPA atau PPSPM sebagai Pemungut PPh Pasal 22 | Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN | Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir                 |
| PPh Pasal 22 yang dipungut Bendahara Pengeluaran                        | Paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran                                    | Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir                 |
| PPh Pasal 4 ayat (2)  | Paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir                | Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir                 |
| PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut PPSPM sebagai Pemungut PPN         | Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN | Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. |



## Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan

| Jenis Pajak   | Tanggal Penyetoran   | Tanggal Pelaporan  |
|---|--|--|
| PPN atau PPN<br>dan PPnBM yang<br>dipungut Bendahara<br>Pengeluaran | Paling lama 7 hari setelah<br>tanggal pelaksanaan<br>pembayaran kepada PKP<br>Rekanan Pemerintah melalui<br>KPPN | Paling lama akhir bulan<br>berikutnya setelah<br>Masa Pajak berakhir |
| PPh Pasal 23  | Paling lama tanggal 10 bulan<br>berikutnya setelah Masa Pajak<br>berakhir  | Paling lama 20 hari<br>setelah Masa Pajak<br>berakhir                |



# Terima Kasih



Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



DitjenPajakRI



@DitjenPajakRI



DitjenPajakRI



1500-200